

Progress Report - Rekonsiliasi

Pelaporan EITI Indonesia
2015

AGENDA

MIGAS

- Status Progress Rekonsiliasi per 2 November 2017
- Isu-isu Rekonsiliasi & Tindak lanjut

MINERBA

- Status Progress Rekonsiliasi per 2 November 2017
- Isu-isu Rekonsiliasi & Tindak lanjut

MIGAS & MINERBA

- Hal-hal yang memerlukan persetujuan Tim Pelaksana
- Draft Laporan Rekonsiliasi (Pemenuhan Standar EITI)
- Temuan dan Rekomendasi
- Hasil Sementara Rekonsiliasi
- Hasil Sementara Satu Sisi

SEKTOR MIGAS

Status Progress Rekonsiliasi - Per 2 Nov 2017

Entitas Pelapor - Migas

Instansi Pemerintah	Perusahaan Migas
1. Ditjen Migas, Kementerian ESDM 2. Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan 3. Dit.PNBP, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan 4. PT Pertamina (Persero) 5. Pemerintah Propinsi Jawa Timur 6. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur 7. Pemerintah Propinsi Riau	1. Kontraktor Kontrak Kerja Sama seluruh wilayah kerja 2. Mitra Kontraktor Kontrak Kerja Sama seluruh wilayah kerja

Status Progress Rekonsiliasi - Per 2 November 2017

Migas - Penerimaan Laporan

Entitas Pemerintah

Status s/d	Jumlah Pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
6 Oktober 2017	9	1	8	11,11 %
26 Oktober 2017	9	7	2	77,78 %

Entitas KKKS

Status s/d	Jumlah Pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
20 September 2017	69	38	31	55,07 %
26 Oktober 2017	69	64	5	92,75 %

Entitas Mitra KKKS

Status s/d	Jumlah Pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
20 September 2017	98	36	62	36,73 %
26 Oktober 2017	98	88	10	89,80 %

Status Progress Rekonsiliasi - Per 2 November 2017

Migas - Perusahaan Belum Lapor (1/2)

Entitas KKKS

No	Perusahaan	Wilayah Kerja	Status 2014	Update Follow Up	Presensi Sosialisasi
1	PT Sumatera Persada Energi	West Kampar	Lapor	Perusahaan tutup / pailit	TIDAK HADIR
2	PT EMP Tonga	Tonga Field	Lapor	Terdapat pergantian manajemen dan belum ada respon dari manajemen baru.	HADIR
3	Petroselat, Ltd.	Selat Panjang, Ons. Riau	Lapor	Perusahaan tutup / pailit	TIDAK HADIR
4	EMP Malacca Strait S.A.	Malacca Strait	Lapor	Terdapat pergantian manajemen dan belum ada respon dari manajemen baru.	HADIR
5	EMP (Bentu), Ltd.	Bentu Segat, Ons. Riau	Lapor	Terdapat pergantian manajemen dan belum ada respon dari manajemen baru.	HADIR

Status Progress Rekonsiliasi - Per 2 November 2017

Migas - Perusahaan Belum Lapor (2/2)

Entitas Mitra KKKS

No	Perusahaan	Wilayah Kerja	Status 2014	Update Follow Up	Presensi Sosialisasi
1	Oilex (West Kampar) Ltd.	WEST KAMPAR	Lapor	Tidak ada kontak CP terkait, sulit dilacak karena KKKS sudah pailit	TIDAK HADIR
2	Kencana Surya Perkasa, PT	TONGA FIELD	Tidak Lapor	Pergantian manajemen dan belum ada respon	TIDAK HADIR
3	Petross Exploration Production, PT	TONGA FIELD	Tidak Lapor	Pergantian manajemen dan belum ada respon	TIDAK HADIR
4	EMP ONWJ Ltd.	NORTHWEST JAVA SEA	Lapor	Pergantian manajemen dan belum ada respon	HADIR
5	Fuel-X Tungkal Ltd.	TUNGKAL, ONS. JAMBI	Tidak Lapor	Sudah dibantu follow up oleh pihak KKKS namun tidak ada tanggapan	TIDAK HADIR
6	Golden Spike Energy Indonesia, PT	RAJA&PENDOPO, ONS. SOUTH SUMATERA	Lapor	Sudah difollow up namun s/d batas waktu belum melapor	TIDAK HADIR
7	Imbang Tata Alam, PT	MALACCA STRAIT	Tidak Lapor	Pergantian manajemen dan belum ada respon	TIDAK HADIR
8	Prime Natuna Energy Inc. (d/h Chevron South Natuna B Inc.)	SOUTH NATUNA SEA BLOCK "B".	Lapor	Sudah difollow up melalui email dan telepon namun s/d batas waktu belum melapor / merespon	HADIR
9	LION International Investment, Ltd	SERAM NON BULA	Tidak Lapor	Sudah dibantu follow up oleh pihak KKKS namun tidak ada tanggapan	TIDAK HADIR

Status Progress Rekonsiliasi - Per 2 November 2017

Migas - Kontribusi Entitas KKKS Belum Lapor

Disajikan dalam Ribuan USD

Entitas Pelapor	GOI Lifting dan Over/(Under) Lifting Oil & Gas	Keterangan
KKKS tidak lapor karena pailit	1.158	2 entitas
KKKS enggan melapor	52.391	3 entitas
TOTAL	53.549	
Total Penerimaan 69 Perusahaan menurut data SKK Migas dan DJA	8.507.219	
Persentase Perusahaan belum lapor	0,63 %	

(*) Angka diatas merupakan total Government Lifting Oil & Gas beserta Over/(Under) Lifting Oil & Gas

Status Pelaporan - Per 2 November 2017

Migas - Kontribusi Entitas KKKS Pelapor

Status	IDR (dalam Ribuan USD)
Kontribusi 64 KKKS yang sudah melapor:	
Government Lifting Oil & Gas	8.675.406,14
Over/Under Lifting Oil & Gas	- 221.735,79
Total PNBP 64 KKKS Yang Sudah Lapor	8.453.670
Total PNBP Minyak dan Gas (69 Perusahaan)	8.507.219
Persentase terhadap jumlah PNBP Migas (69 Perusahaan)	
Perusahaan yang sudah melapor	99,37 %
Perusahaan belum melapor	0,63 %

Status Progress Rekonsiliasi - Per 2 Nov 2017
Migas - Lembar Otorisasi Pajak

Status LO Pajak	Tanggal Pengumpulan	Jumlah LO Pajak	Data DJP Masuk
LO Pajak Tahap 1	03-Okt-2017	57 lbr	17-Okt-2017
LO Pajak Tahap 2	12-Okt-2017	22 lbr	20-Okt-2017
LO Pajak Tahap 3	20-Okt-2017	30 lbr	30-Okt-2017
LO Pajak Tahap 4	27-Okt-2017	13 lbr	-
TOTAL		122 lbr	
Sisa LO Pajak yang belum lengkap		45 lbr	

Isu-Isu Rekonsiliasi Sektor Migas

Isu-isu dalam akuisisi data

- Informasi peralihan *Participating Interest* dan pergantian operator yang tidak up-to-date menyebabkan formulir EITI dikirimkan ke pemegang *Participating Interest* atau operator yang lama
- Turunnya harga minyak dunia berperan dalam menyebabkan beberapa perusahaan migas pailit atau harus mengadakan perampingan organisasi dan restrukturisasi manajemen
- Proses otorisasi manajemen perusahaan yang memakan waktu
- Banyak perusahaan migas yang tidak melengkapi LO Pajak karena di pelaporan EITI tahun-tahun sebelumnya tidak ada mekanisme pembukaan data pajak
- Beberapa Partner KKKS merupakan perusahaan asing yang tidak mempunyai kantor perwakilan di Indonesia
- Tidak adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak melapor
- Pada Ditjen Migas respon terkait pengisian formulir EITI untuk data lifting gas terkendala personil yang berhalangan dan tidak ada pengganti.

Isu-isu dalam proses rekonsiliasi

- Perbedaan persepsi mengenai cash basis dan accrual basis
- Perbedaan persepsi pengisian informasi FQR antara KKKS dengan SKK Migas
- Rekonsiliasi data lifting minyak dengan Ditjen Migas terkendala belum adanya respon dari unit terkait sehingga masih belum dapat dilakukan.

Hasil Sementara Rekonsiliasi Sektor Migas

Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas (Valas)

Disajikan dalam Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Total Lifting - Minyak	13.839.987	13.822.600	(17.387)	13.743.782	13.822.600	78.819	1%
Total Lifting - Gas	17.014.741	17.122.820	108.079	17.014.741	17.122.820	108.079	1%
Domestic Market Obligation Fee	443.280	428.870	(14.410)	414.661	427.600	12.940	3%
Over/(Under) Lifting - Minyak	20.248	(91.420)	(111.668)	(33.119)	(47.904)	(14.785)	31%
Over/(Under) Lifting - Gas	(205.438)	(171.010)	34.427	(195.400)	(168.720)	26.680	-16%
Total	31.112.818	31.111.859	(958)	30.944.665	31.156.397	211.732	1%

Hasil Sementara Rekonsiliasi

Sektor Migas

Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas (Volume)

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Government Lifting - Minyak (Barrel)	114.166.053	114.845.848	679.795	114.584.926	114.845.841	260.914	0%
Government Lifting - Gas (MSCF)	587.042.987	529.355.842	(57.687.146)	445.461.989	512.955.394	67.493.405	13%
Domestic Market Obligation (Barrel)	21.099.864	20.023.303	(1.076.561)	19.623.500	20.910.860	1.287.360	6%
Total	722.308.905	664.224.993	(58.083.912)	579.670.416	648.712.095	69.041.679	11%

Hasil Sementara Rekonsiliasi

Sektor Migas

Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Migas - ESDM

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	Ditjen Migas	Perbedaan Awal	KKKS	Ditjen Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Total Lifting - Minyak (Barrel)	299.463.314	286.703.248	(12.760.066)	-	-	-	
Total Lifting - Gas (MSCF)	1.752.581.227	-	(1.752.581.227)	-	-	-	
Signature Bonus untuk Perpanjangan Kontrak (USD'000)	-	-	-	-	-	-	0%
Production Bonus (USD'000)	8.750	9.750	1.000	8.750	9.750	1.000	10%
Total	2.052.053.291	286.712.998	(1.765.340.293)	8.750	9.750	1.000	10%

Hasil Sementara Rekonsiliasi

Sektor Migas

Rekonsiliasi KKKS dengan Dit. Anggaran & Dit. Pajak

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	DJA - DJP	Perbedaan Awal	KKKS	DJA - DJP	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
PPh Migas-Operator	2.458.015,16	2.354.166,08	(103.849,08)	-	-	-	
PPh Migas-Partner	1.564.351,47	1.259.152,49	(305.198,98)	-	-	-	
Total	4.022.366,63	3.613.318,57	(409.048,06)	-	-	-	

Hasil Sementara Rekonsiliasi

Sektor Migas

Rekonsiliasi SKK Migas dengan Dit. Anggaran

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	SKK Migas	DJA	Perbedaan Awal	SKK Migas	DJA	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Government Lifting – Minyak							
Ekspor	247.100,95	5.193.857,12	(346.672,34)	247.100,95	5.527.753,07	0,00	0
Domestik	5.293.428,50			5.280.652,12			
Government Lifting – Gas							
Ekspor	1.403.816,90	3.114.030,90	(83.548,18)	1.403.816,90	3.196.089,73	(0,01)	0
Domestik	1.793.762,18			1.792.272,84			
Total	8.738.108,53	8.307.888,02	(430.220,51)	8.723.842,81	8.723.842,80	(0,01)	0

Hasil Sementara Rekonsiliasi

Sektor Migas

Penerimaan Negara Yang Tidak Direkonsiliasi

Penerimaan Negara	Jumlah
Pajak Bumi dan Bangunan (juta Rp)	25.087.739
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (juta Rp)	52.078
Pajak Pertambahan Nilai (juta Rp)	8.064.839
CSR (dalam ribuan USD) :	
1. Hubungan Masyarakat	4.208
2. Pemberdayaan Masyarakat	238
3. Pelayanan Masyarakat	6.380
4. Infrastruktur	4.586
5. Lingkungan	1.335

SEKTOR MINERBA



Status Progress Rekonsiliasi - Per 2 November 2017

Entitas Pelapor - Minerba

Instansi Pemerintah	Perusahaan Minerba
1. Ditjen Minerba, Kementerian ESDM 2. Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan 3. Dit.PNBP, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan 4. Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan 5. Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan 6. PT Kereta Api Indonesia (Persero) 7. Pemerintah Provinsi Jawa Timur 8. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 9. Pemerintah Provinsi Riau	1. Perusahaan Batubara pemegang kontrak PKP2B dan IUP-Batubara yang membayar royalty >Rp 14 Miyar 2. Perusahaan Batubara pemegang kontrak KK-Mineral dan IUP-Mineral yang membayar royalty >Rp 14 Milyar

Status Progress Rekonsiliasi - Per 2 November 2017

Minerba - Penerimaan Laporan

Entitas Pemerintah

Status s/d	Jumlah Pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
6 Oktober 2017	9	1	8	11,11 %
26 Oktober 2017	9	7	2	77,78 %

Entitas Perusahaan

Status s/d	Jumlah Pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
20 September 2017	123	32	91	26 %
26 Oktober 2017	123	81	42	66 %

Status Progress Rekonsiliasi - Per 2 November 2017

Minerba - Perusahaan Belum Lapor (1/4)

No	Kontrak	Perusahaan	Provinsi	Status 2014	Update Follow Up	Presensi Sosialisasi
1	IUP	KUSUMA RAYA UTAMA	Bengkulu		Akan menyampaikan laporan	HADIR
2	PKP2B	KALIMANTAN ENERGI LESTARI	Kalimantan Selatan	Tidak Melapor	Telah ditelpon & diemail cc APBI, belum ada respon	HADIR
3	PKP2B	PD BARAMARTA	Kalimantan Selatan	Melapor	Sudah ditelpon & diemail cc APBI, belum ada disposisi dari pimpinan	TIDAK HADIR
4	IUP	ASTRI MINING RESOURCES	Kalimantan Selatan		Sudah ditelpon & diemail, belum ada respon	TIDAK HADIR
5	IUP	BARAMEGA CITRA MULIA PERSADA	Kalimantan Selatan	Tidak Melapor	Laporan sedang dalam proses pengerjaan	TIDAK HADIR
6	IUP	BINUANG MITRA BERSAMA	Kalimantan Selatan	Melapor	Sudah menyampaikan laporan	TIDAK HADIR
7	IUP	BINUANG MITRA BERSAMA BLOK DUA	Kalimantan Selatan		Sudah menyampaikan laporan	TIDAK HADIR
8	IUP	INDOASIA CEMERLANG	Kalimantan Selatan		Sudah ditelpon & diemail, belum ada respon	TIDAK HADIR
9	IUP	PROLINDO CIPTA NUSANTARA	Kalimantan Selatan	Melapor	Sudah ditelpon & diemail, belum ada respon	TIDAK HADIR
10	IUP	SEMESTA CENTRAMAS	Kalimantan Selatan		Sudah ditelpon & diemail, belum ada respon	TIDAK HADIR

Status Progress Rekonsiliasi - Per 2 Nov 2017

Minerba - Perusahaan Belum Lapor (2/4)

No	Kontrak	Perusahaan	Provinsi	Status 2014	Update Follow Up	Presensi Sosialisasi
11	IUP	USAHA BARATAMA JESINDO	Kalimantan Selatan		Kekurangan SDM, laporan diusahakan dikerjakan	TIDAK HADIR
12	PKP2B	SINGLURUS PRATAMA	Kalimantan Timur	Melapor	Sudah menyampaikan laporan	HADIR
13	IUP	ARTHA PRATAMA JAYA	Kalimantan Timur		Sudah ditelpon & diemail, belum ada respon	TIDAK HADIR
14	IUP	BARA KUMALA SAKTI	Kalimantan Timur	Tidak Melapor	Sudah ditelpon & diemail, belum ada respon	TIDAK HADIR
15	IUP	BERAU USAHA MANDIRI	Kalimantan Timur		Sudah ditelpon & diemail, belum ada respon	TIDAK HADIR
16	IUP	CAHAYA ENERGI MANDIRI	Kalimantan Timur	Tidak Melapor	Sudah ditelpon & diemail, belum ada respon	TIDAK HADIR
17	IUP	FAZAR UTAMA	Kalimantan Timur	Tidak Melapor	Sudah ditelpon & diemail, belum ada respon	TIDAK HADIR
18	IUP	FIRMAN KETAUN	Kalimantan Timur	Melapor	Sudah ditelpon & diemail, belum ada respon	TIDAK HADIR
19	IUP	INTERNASIONAL PRIMA COAL	Kalimantan Timur	Melapor	Akan menyampaikan laporan	TIDAK HADIR
20	IUP	KALTIM JAYA BARA	Kalimantan Timur	Tidak Melapor	Info melalui telpon bhw manajemen perusahaan tdk akan lapor, karena bukan perusahaan publik	TIDAK HADIR

Status Progress Rekonsiliasi - Per 2 Nov 2017

Minerba - Perusahaan Belum Lapor (3/4)

No	Kontrak	Perusahaan	Provinsi	Status 2014	Update Follow Up	Presensi Sosialisasi
21	IUP	KAYAN PUTRA UTAMA COAL	Kalimantan Timur	Tidak Melapor	Sudah ditelpon & diemail, belum ada respon	TIDAK HADIR
22	IUP	KHOTAI MAKMUR INSAN ABADI	Kalimantan Timur		Perusahaan kekurangan SDM, tidak ada yang mengerjakan laporan.	TIDAK HADIR
23	IUP	LEMBU SWANA PERKASA	Kalimantan Timur	Tidak Melapor	Sudah ditelpon & diemail, belum ada respon	TIDAK HADIR
24	IUP	MULTI SARANA AVINDO/ANUGERAH BARA KALTIM	Kalimantan Timur	Tidak Melapor	Sudah ditelpon & diemail, belum ada respon	TIDAK HADIR
25	IUP	WELARCO SUBUR JAYA	Kalimantan Timur	Tidak Melapor	Sudah ditelpon & diemail, belum ada respon	TIDAK HADIR
26	IUP	LAMINDO INTER MULTIKON	Kalimantan Utara		Sudah ditelpon & diemail, belum ada respon	TIDAK HADIR
27	IUP	PIPIT MUTIARA JAYA	Kalimantan Utara	Tidak Melapor	Sudah ditelpon & diemail, belum ada respon	TIDAK HADIR
28	IUP	GANE PERMAI SENTOSA	Maluku Utara		Sudah ditelpon & diemail, belum ada respon	TIDAK HADIR
29	PKP2B	BATURONA ADIMULYA	Sumatera Selatan		Info manajemen perusahaan melalui telpon, tahun ini perusahaan tidak melapor	HADIR
30	IUP	AMAN TOEBILLAH PUTRA	Sumatera Selatan	Tidak Melapor	Sudah ditelpon & diemail, belum ada respon	TIDAK HADIR

Status Progress Rekonsiliasi - Per 2 Nov 2017

Minerba - Perusahaan Belum Lapor (4/4)

No	Kontrak	Perusahaan	Provinsi	Status 2014	Update Follow Up	Presensi Sosialisasi
31	IUP	BARA ALAM UTAMA	Sumatera Selatan	Tidak Melapor	Sudah ditelpon & diemail, belum ada respon	TIDAK HADIR
32	IUP	BARA ANUGERAH SEJAHTERA	Sumatera Selatan		Sudah ditelpon & diemail, belum ada respon	TIDAK HADIR
33	IUP	TININDO INTER NUSA	Bangka Belitung	Tidak Melapor	Sudah ditelpon & diemail, belum ada respon	TIDAK HADIR
34	IUP	VENUS INTI PERKASA	Bangka Belitung	Tidak Melapor	Sudah ditelpon & diemail, belum ada respon	TIDAK HADIR

Status Progress Rekonsiliasi - Per 2 Nov 2017

Minerba - Perusahaan Tidak Dapat Dihubungi

No	Kontrak	Perusahaan	Provinsi	Status 2014	Update Follow Up	Presensi Sosialisasi
1	IUP	PUTRA PARAHYANGAN MANDIRI	Kalimantan Selatan		Pindah alamat namun belum ada informasi lengkap. Dinas ESDM Kalsel tidak mengetahui alamat lengkap perusahaan.	TIDAK HADIR
2	IUP	CENTRAL MINING RESOURCES	Kalimantan Timur		Pindah alamat namun belum ada informasi lengkap. Dinas ESDM Kaltim tidak mengetahui alamat lengkap perusahaan.	TIDAK HADIR
3	IUP	ANDHIKA RAYA SEMESTA	Tidak Jelas		Lokasi wilayah tambang belum teridentifikasi baik di Dinas ESDM Provinsi maupun di Ditjen Minerba	TIDAK HADIR

Status Progress Rekonsiliasi - Per 2 Nov 2017

Minerba - Perusahaan Tidak Berproduksi

No	Kontrak	Perusahaan	Provinsi	Status 2014	Update Follow Up	Presensi Sosialisasi
1	IUP	REKASINDO GURIANG TANDANG	Bengkulu		informasi dari Dinas ESDM Bengkulu dan perusahaan, tidak berproduksi sejak Mei Tahun 2015	TIDAK HADIR
2	IUP	ANUGERAH TUJUH SEJATI	Kalimantan Selatan		Informasi dari perusahaan, sudah tidak berproduksi lagi sejak akhir Tahun 2016	TIDAK HADIR
3	IUP	ANUGERAH BORNEO COMMUNITY	Kalimantan Selatan		Informasi dari perusahaan sudah tidak produksi sejak Mei 2017	TIDAK HADIR
4	IUP	BERINGIN JAYA ABADI	Kalimantan Timur	Tidak Melapor	Informasi dari perusahaan, sudah tidak berproduksi lagi sejak akhir Tahun 2016	TIDAK HADIR
5	IUP	RINJANI KARTANEGARA	Kalimantan Timur	Tidak Melapor	Informasi dari Dinas ESDM Kaltim dan perusahaan, tidak berproduksi sejak bulan Juni 2017	TIDAK HADIR

Status Progress Rekonsiliasi - Per 2 Nov 2017

Minerba - Kontribusi Perusahaan Belum Lapor

Disajikan dalam Jutaan Rupiah

Perusahaan	Royalti, PHT dan Landrent	%	Keterangan
Perusahaan belum lapor (34 perusahaan)	2.023.295	7.32%	Jika 34 perusahaan tersebut lapor, maka persentase perusahaan belum lapor menjadi sebesar 1.19%
Perusahaan tidak dapat dihubungi (3 perusahaan)	195.020	0.71%	
Perusahaan tidak memproduksi (5 perusahaan)	133.149	0.48%	
TOTAL	2.351.464		
Total Penerimaan 123 Perusahaan menurut data Ditjen Minerba	27.645.510		
Persentase Perusahaan belum lapor	8.51 %		Minta rekomendasi MSG apakah perlu ditindak lanjuti

(*) Angka diatas merupakan total royalti, PHT dan iuran tetap

Status Progress Rekonsiliasi - Per 2 Nov 2017

Minerba - Kontribusi Perusahaan Pelapor

Status	IDR (dalam jutaan Rupiah)
Kontribusi 81 Perusahaan yang sudah melapor:	
Royalti	13.310.126
Penjualan Hasil Tambang	11.775.150
Iuran Tetap	208.770
Total PNBP 81 Perusahaan Yang Sudah Lapor	25.294.046
Total PNBP Perusahaan Sample (123 Perusahaan)	27.645.510
Total PNBP Pertambangan	29.631.672
Persentase terhadap jumlah sample (123 Perusahaan)	
Perusahaan yang sudah melapor	91,49 %
Perusahaan belum melapor	8,51 %
Persentase terhadap Total PNBP Pertambangan	
Perusahaan yang sudah melapor	85,36 %
Perusahaan belum melapor	7,94 %

Status Pelaporan
Minerba - Kontribusi Perusahaan Pelapor

Status	IDR (dalam jutaan Rupiah)
Kontribusi 74 Perusahaan yang sudah melapor dan menyerahkan LO Pajak untuk membuka data pajak	
PPH Badan	11.997.784
Total PPh Badan 74 Perusahaan Yang Sudah Lapor	11.997.784
Total Penerimaan Pajak Sektor Pertambangan Batubara & Lignit dan Pertambangan Bijih Logam	22.407.975
Persentase terhadap Penerimaan Pajak Sektor Pertambangan Batubara & Lignit dan Pertambangan Bijih Logam	
Perusahaan yang sudah melapor (74 perusahaan)	53.54%
Perusahaan belum melapor (49 perusahaan)	46.46%

Status Progress Rekonsiliasi - Per 2 Nov 2017
Minerba - Lembar Otorisasi Pajak

Status	Jumlah	Tindak Lanjut
Sudah menyerahkan lembar otorisasi pajak lengkap	74	
Sudah lapor namun belum menyerahkan lembar otorisasi dan akta	5	Follow up ke perusahaan: 1. Bukit Baiduri Energi 2. Surya Sakti Dharma Kencana 3. Bhumi Rantau Energi 4. Pesona Khatulistiwa Nusantara 5. Indexim Coalindo
Tidak bersedia memberikan lembar otorisasi pajak	2	1. Sago Prima Pratama 2. J Resources Bolaang Mongondow
TOTAL	81	

Isu-Isu Rekonsiliasi Sektor Minerba

- Informasi *database* perusahaan yang memuat alamat perusahaan, wilayah tambang, email perusahaan, person in charge serta nomor telpon/ponsel tidak lengkap dan tidak up to date.
- Pada beberapa entitas pemerintah daerah, respon terkait pengisian formulir EITI terkendala birokrasi disposisi surat pengisian EITI di internal institusi.
- Dukungan MSG memfasilitasi Independent Administrator dalam proses pengumpulan laporan
- Belum seluruh setoran menggunakan NTPN, sehingga menyulitkan kedua sisi untuk melakukan verifikasi pada saat terdapat perbedaan angka.
- Tidak adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak melapor, karena tidak adanya lembaga yang melakukan *enforcement* pada perusahaan minerba untuk melapor.

Hasil Sementara Rekonsiliasi

Sektor Minerba

Rekonsiliasi dengan Ditjen Minerba (Royalti, PHT, Landrent)

Disajikan dalam Ribuan USD dan Jutaan Rupiah

Penerimaan Negara	Perusahaan Minerba	Ditjen Minerba	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	Ditjen Minerba	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi	%
Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
Royalti	826,917	823,942	(2,976)	861,744	856,460	(5,284)	1%
PHT	718,241	736,455	18,214	685,078	765,151	80,073	10%
Landrent	6,695	14,768	8,073	7,207	9,048	1,841	20%
Total USD	1,551,853	1,575,165	23,311	1,554,030	1,630,659	76,629	5%
Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
Royalti	2.073.446	13.310.126	11.236.681	2.051.939	3.614.632	1.562.693	43%
PHT	1.614.814	11.775.150	10.160.335	1.780.913	5.435.982	3.655.069	67%
Landrent	23.155	208.770	185.615	19.606	44.106	24.500	56%
Total Rupiah	3.711.415	25.294.046	21.582.631	3.852.459	9.094.720	5.242.262	58%

Hasil Sementara Rekonsiliasi Sektor Minerba

Simulasi klasifikasi perbedaan sementara - ESDM

Disajikan dalam Ribuan USD dan Jutaan Rupiah

	Rupiah	USD	Keterangan
Klasifikasi Perbedaan:			
Salah klasifikasi pencatatan royalty, pht, landrent	762.431	72.807	
Belum teridentifikasi	673.079	3.822	
Satu pembayaran dilaporkan di 2 mata uang	3.806.752		
Perbedaan per 2 Nov 2017	5.242.262	76.629	
Total Penerimaan	9.094.720	1.630.659	
Persentase (%)	58%	5%	
Perbedaan per 14 Nov 2017	304.921	4.268	Masih proses rekonsiliasi
Total Penerimaan	4.252.001	1.620.067	
Persentase (%)	7.17%	0.26%	

Hasil Sementara Rekonsiliasi Sektor Minerba

Rekonsiliasi dengan Ditjen Pajak (PPh Badan)

Disajikan dalam Ribuan USD dan Jutaan Rupiah

Penerimaan Negara	Perusahaan Minerba	Ditjen Pajak	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	Ditjen Pajak	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi	%
Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
PPh Badan	1,400,064	550,242	(849,822)	1,018,548	785,201	(233,346)	30%
Total USD	1,400,064	550,242	(849,822)	1,018,548	785,201	(233,346)	30%
Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
PPh Badan	2.805.901	2.281.723	(524.178)	2.508.819	2.277.247	(231.571)	10%
Total Rupiah	2.805.901	2.281.723	(524.178)	2.508.819	2.277.247	231.571	10%

Hasil Sementara Rekonsiliasi Sektor Minerba

Simulasi klasifikasi perbedaan sementara - DJP

Disajikan dalam Ribuan USD dan Jutaan Rupiah

	Rupiah	USD	Keterangan
Klasifikasi Perbedaan:			
Kurang catat produk hukum lainnya	88,929	145,928	
Belum teridentifikasi	142,642	87,418	
Perbedaan per 2 Nov 2017	231.572	233.347	
Total Penerimaan	2.277.247	785.201	
Persentase (%)	10%	30%	
Perbedaan per 14 Nov 2017	119.177	49.598	Masih proses rekonsilias
Total Penerimaan	2.457.347	967.447	
Persentase (%)	4.85%	5.13%	

Hasil Sementara Rekonsiliasi

Sektor Minerba

Rekonsiliasi dengan Ditjen Anggaran (Dividen)

Disajikan dalam Ribuan USD dan Jutaan Rupiah

Penerimaan Negara	Perusahaan Minerba	Ditjen Anggaran	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	Ditjen Anggaran	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi	%
Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
PPh Badan	-	-	-	-	-	-	0%
Total USD	-	-	-	-	-	-	0%
Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
Deviden	506.043	610.638	104.594	610.638	610.638	-	0%
Total Rupiah	506.043	610.638	104.594	610.638	610.638	-	0%

Hasil Sementara Rekonsiliasi

Sektor Minerba

Rekonsiliasi dengan PT Kereta Api Indonesia (Fee Transportasi)

Disajikan dalam Ribuan USD dan Jutaan Rupiah

Penerimaan Negara	Perusahaan Minerba	PT KAI (Persero)	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	PT KAI (Persero)	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi	%
Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
Fee Transportasi	73,002	72,368	(634)	16,748	16,748	-	0%
Total USD	73,002	72,368	(634)	16,748	16,748	-	0%
Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
Fee Transportasi	1.709.842	1.709.842	-	397.447	397.447	-	0%
Total Rupiah	1.709.842	1.709.842	-	397.447	397.447	-	0%

Hasil Sementara Satu Sisi

Sektor Minerba

Penerimaan Negara Yang Tidak Direkonsiliasi

Penerimaan Negara	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Volume (dalam Ton)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	571.525	2.077	
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	405.837	38.921	
Pembayaran Langsung ke Pemda	436.934	1.810	
Penyediaan Infrastruktur	-	-	
Penggunaan Kawasan Hutan	725.879	918	
CSR:			
1. Hubungan Masyarakat	120.057	33.044	
2. Pemberdayaan Masyarakat	50.714	28.313	
3. Pelayanan Masyarakat	144.488	27.534	
4. Infrastruktur	176.833	15.414	
5. Lingkungan	12.526	304	
DMO Batubara			346.866.894

Hasil Sementara Satu Sisi

Sektor Minerba

Data Produksi dan Penjualan Minerba Tahun 2015

Komoditas	Volume (jutaan ton)		Nilai Penjualan	
	Produksi	Penjualan	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)
<i>Dalam Negeri</i>				
Batubara	3	109	26.752.239	2,633,732
Mineral	764	414	3.011.205	1,368,896
Total	767	523	29.763.443	4,002,627
<i>Luar Negeri</i>				
Batubara	2.634	213	5.134.877	9,376,366
Mineral	1.369	455	6.858.263	4,316,262
Total	4.003	668	11.993.140	13,692,628

SEKTOR MIGAS & MINERBA



Status Progress Rekonsiliasi - Per 2 Nov 2017
Materiality Value Laporan - Gabungan

Disajikan dalam Jutaan Rupiah

	Rupiah	Scoping	%
Scoping revenue		224.244.086	
GOI lifting oil	74.027.669		
GOI lifting gas	42.802.034		
Over (under) lifting	(3.514.465)		
C&D tax	49.557.005		
Royalty	13.310.126		
PHT	11.775.150		
Landrent	208.770		
PPh Badan	11.997.784		
	200.164.072	224.244.086	89

**Hal-Hal yang Memerlukan Persetujuan Tim Pelaksana
Sektor Migas & Minerba**

No	Permasalahan	Persetujuan Tim Pelaksana
1	Perubahan cakupan rekonsiliasi perusahaan minerba untuk perusahaan yang sudah tidak memproduksi	
2	Batas waktu pengembalian form pelaporan	

Draft Laporan Rekonsiliasi

Matrix daftar isi laporan rekonsiliasi

Index Bab	Judul Bab/Sub Bab	EITI Standard 2016
1	Latar Belakang	
2	Ruang Lingkup Rekonsiliasi	
2.1	Penerimaan Negara	
2.1.1	Komponen Penerimaan Negara yang Direkonsiliasi	3.2, 4.1, 4.2, 4.5
2.1.2	Komponen Penerimaan Negara yang Tidak Direkonsiliasi	4.1, 4.6, 6.1, 6.2
2.1.3	Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif	4.2
2.1.4	Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter	4.3
2.1.5	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)	6.1, 6.2
2.1.6	Transportasi	4.4
2.1.7	BUMN Industri Ekstraktif	4.5
2.1.8	Pembayaran Langsung Perusahaan ke Pemerintah Daerah	4.6
2.1.9	Penerimaan Negara Lainnya	4.1
2.2	Perusahaan yang Direkonsiliasi	
2.2.1	Perusahaan Migas	2.3, 2.5
2.2.2	Perusahaan Minerba	2.3, 2.5
3	Metodologi	
3.1	Metode Rekonsiliasi	4.8, 4.9
3.2	Aktivitas dan Fokus dari Rekonsiliasi	4.8, 4.9
3.2.1	Penyusunan Format Pelaporan	4.8, 4.9
3.2.2	Distribusi Format Pelaporan ke Perusahaan dan Instansi Pemerintah	4.8, 4.9
3.2.3	Daftar Perusahaan yang Tidak Melapor	4.8, 4.9
3.2.4	Proses Rekonsiliasi	4.8, 4.9

Draft Laporan Rekonsiliasi

Matrix daftar isi laporan rekonsiliasi

Index Bab	Judul Bab/Sub Bab	EITI Standard 2016
3.2.5	Kesulitan Pengumpulan Data	4.8, 4.9
3.2.6	Kerahasiaan Data	4.8, 4.9
3.2.7	Tidak Adanya Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Melapor	4.8, 4.9
4	Hasil Rekonsiliasi	
4.1	Perusahaan Migas	
4.1.1	Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan SKK Migas	3.2, 4.1, 4.2, 4.5
4.1.2	Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Migas	3.2, 4.1, 4.2, 4.5
4.1.3	Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Anggaran	3.2, 4.1, 4.2, 4.5
4.1.4	Penerimaan Negara yang Dikelola SKK Migas dan Diterima oleh Ditjen Anggaran	3.2, 4.1, 4.2, 4.5
4.1.5	Laporan Penerimaan Negara dan Daerah yang Disajikan Satu Sisi Perusahaan	4.1
4.2	Perusahaan Minerba	
4.2.1	Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Minerba	3.2, 4.1, 4.2, 4.5
4.2.2	Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Pajak	3.2, 4.1, 4.2, 4.5
4.2.3	Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Anggaran	3.2, 4.1, 4.2, 4.5
4.2.4	Rekonsiliasi Antara PT Bukit Asam (Persero), Tbk. dengan PT Kereta Api	4.4
4.2.5	Laporan Penerimaan Negara dan Daerah yang Disajikan Satu Sisi Perusahaan	4.1
5	Penyaluran Dana Hasil Penerimaan Industri Ekstraktif dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah	
5.1	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	4.6
5.2	Alokasi Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah	5.1, 5.2
5.2.1 – 5.2.2	Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan Minerba	5.1, 5.2
5.2.3	Proses Penyaluran DBH	5.1, 5.2
5.2.4	Daerah Penghasil	5.1, 5.2
6	Prosedur Audit dan Keyakinan (<i>Assurance</i>)	4.9

Draft Laporan Rekonsiliasi

Progress Rekomendasi laporan tahun 2014

Subyek	Rekomendasi	Pelaksanaan dalam pelaporan ini
Belum ada standarisasi pengukuran dampak terkait tanggung jawab social, ekonomi dan lingkungan	Menambahkan informasi ke dalam template/form laporan 2015 untuk diisi oleh perusahaan: • CSR dan infrastruktur • Jumlah tenaga kerja tetap/kontrak • Laporan analisa dampak sosial dan lingkungan (AMDAL) untuk perusahaan di atas Rp 500 Milyar	• CSR dan penyediaan infrastruktur telah ditambahkan dalam template/form laporan 2015 • Informasi jumlah tenaga kerja tetap/kontrak telah ditambahkan ke template/form laporan 2015 • Penyampaian laporan AMDAL hanya mencantumkan kepemilikan dokumen AMDAL perusahaan (ada/tidak) dan mencantumkan tanggal persetujuan AMDAL
Data perusahaan seperti informasi alamat, email, no telp tidak update	• IA menyusun direktori dari data yang disampaikan oleh perusahaan • Sekretariat EITI selalu melakukan pemutakhiran data kontak perusahaan pelapor berdasarkan hasil akhir dari Laporan EITI	IA telah melaksanakan update data <i>contact person</i> , informasi alamat, email dan nomor telpon perusahaan
Waktu pelaporan template bersamaan dengan proses audit eksternal perusahaan	Memperhitungkan jadwal pelaksanaan penyusunan Laporan EITI Indonesia untuk periode berikutnya	IA setuju dengan rekomendasi Laporan EITI tahun 2014

Draft Laporan Rekonsiliasi

Progress Rekomendasi laporan tahun 2014

Subyek	Rekomendasi	Pelaksanaan dalam pelaporan ini
Panduan pengisian dan formulir pelaporan tidak update - Keterbatasan system pencatatan setoran negara yang hanya didasarkan pada transaksi uang masuk kas - Adanya perbedaan konversi rate dari MMBTU ke MSCF antara Perusahaan dan Ditjen Migas. Dan quality/grade gas yang berbeda-beda di masing-masing perusahaan	- Formulir laporan akan dibuatkan panduan pengisian berdasarkan FQR - Diperlukan kesepakatan dasar transaksi cash-basis atau accrual-basis. Akan tetapi, disarankan tetap menggunakan cash-basis, mengikuti system pemerintah. - Diperlukan kesepakatan satuan volume migas	- Dalam formulir pelaporan sudah dipisahkan transaksi yang menggunakan basis kas dan basis akrual - Formulir pelaporan akan meminta satuan volume migas dala MSCF
Sampel provinsi atas data DBH selalu sama, yaitu Jatim, Riau, dan Kaltim	Tambahan Provinsi yang melapor memerlukan kesepakatan MSG	IA setuju dengan rekomendasi Laporan EITI tahun 2014

Draft Laporan Rekonsiliasi

Rekomendasi laporan tahun 2015

Subyek	Permasalahan	Rekomendasi
Pengumpulan laporan perusahaan minerba	Tidak adanya lembaga yang melakukan <i>enforcement</i> pada perusahaan minerba untuk melapor	Pemerintah Provinsi sebagai pemberi IUP (melalui Dinas ESDM) diharapkan dapat memberikan himbauan kepada perusahaan minerba setempat untuk menyampaikan laporan
Pengumpulan laporan perusahaan migas	Informasi peralihan Participating Interest dan pergantian Operator yang tidak up-to-date	Kementerian ESDM diharapkan dapat memberikan informasi status kepemilikan <i>Participating Interest</i> dalam bentuk perbandingan antara kepemilikan pada tahun sesuai cakupan rekonsiliasi dan kepemilikan terkini



Terima Kasih